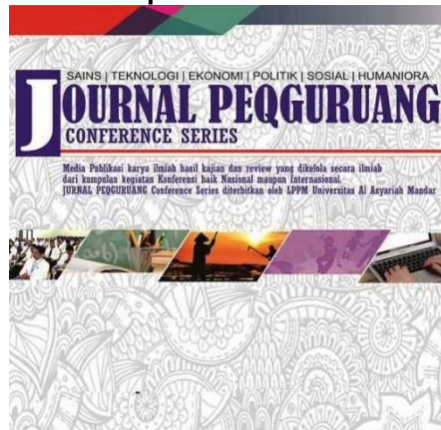


Graphical abstract



IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA TENAGA KERJA MANDIRI DALAM MENWUJUTKAN KEMANDIRIAN DI KECAMATAN POLEWALI

¹Andriani, ²Sahrul, ³Mukhlis Hannan.

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar.

*Corresponding author

andrianikenetz@gmail.com, ruulzyyy@gmail.com
muklishannan49@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of the Independent Workers' Capital Assistance Program in Realizing Economic Independence in Polewali District. Supervised by Andriani and Mukhlis Hannan.

This study aims to determine the implementation of the Independent Workers' Capital Assistance Program (TKM) in encouraging economic independence of the community in Polewali District. This program is a government initiative to reduce unemployment and improve community welfare by providing capital assistance to independent worker groups. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the program is quite effective in increasing the business capacity of the recipients of assistance. However, there are several obstacles such as limited assistance, lack of advanced entrepreneurship training, and product marketing challenges. However, most recipients of assistance stated that this program had a positive impact on increasing their income and economic independence. Stronger synergy is needed between the government, local business actors, and the community to ensure the sustainability of the program and improve more optimal results.

Keywords: Business Capital Assistance, Independent Workers, Economic.

ABSTRAK

Implementasi Program Bantuan Modal Usaha Tenaga Kerja Mandiri Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Di Kecamatan Polewali. Di bimbing oleh Andriani dan Mukhlis Hannan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Modal Usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di Kecamatan Polewali. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan modal kepada kelompok tenaga kerja mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kapasitas usaha para penerima bantuan. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan pendampingan, kurangnya pelatihan kewirausahaan lanjutan, serta tantangan pemasaran produk. Meskipun demikian, sebagian besar penerima bantuan menyatakan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku usaha lokal, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program dan peningkatan hasil yang lebih optimal.

Kata kunci: Bantuan Modal Usaha, Tenaga Kerja Mandiri, Kemandirian Ekonomi.

Article history

DOI: 10.35329/jp.v7i2.6570

Received : 2025-10-20 | Received in revised form : 2025-11-21 | Accepted : 2025-11-25

1. PENDAHULUAN

Tingkat pengangguran di Indonesia mencapai angka yang cukup signifikan, dan salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan memberikan bantuan modal usaha kepada tenaga kerja mandiri. Program bantuan modal usaha ini dirancang untuk membantu masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha. Dengan adanya modal yang cukup, masyarakat diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan mereka. Melalui program ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terangkat, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam konteks pembangunan ekonomi, tenaga kerja mandiri menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Program-program bantuan yang diinisiasi oleh pemerintah maupun lembaga swasta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menciptakan usaha mandiri.

Di Indonesia, program bantuan ini mencakup berbagai segmen, antara lain bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, serta akses terhadap informasi pasar. Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama, karena dengan adanya usaha mandiri, diharapkan dapat menciptakan pendapatan yang lebih stabil bagi mereka.

Pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri di Polewali menarik untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan pusat diimplementasikan pada tingkat lokal. Efektivitas program ini sangat bergantung pada beberapa aspek, antara lain mekanisme seleksi penerima, transparansi dan ketepatan penyaluran bantuan, intensitas pendampingan usaha, serta komitmen penerima bantuan dalam mengelola usahanya.

Beberapa temuan lapangan di berbagai daerah menunjukkan bahwa tidak semua program bantuan modal usaha berhasil mencapai tujuannya. Masih ditemukan masalah seperti rendahnya keberlanjutan usaha, kurangnya kemampuan manajerial penerima bantuan, hingga penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi program ini di Polewali, khususnya dalam hal efektivitasnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Proses penerimaan bantuan TKM dimulai dengan pembentukan kelompok usaha mandiri oleh masyarakat calon penerima manfaat. Kelompok ini kemudian menyusun dan mengajukan proposal usaha kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Setelah melalui proses verifikasi administrasi dan survei lapangan, kelompok yang dinilai layak akan mendapatkan pelatihan dasar kewirausahaan, pendampingan teknis, dan bantuan sarana usaha yang disesuaikan dengan jenis usaha yang direncanakan. Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksana di tingkat daerah, pendamping TKM yang bertugas memfasilitasi dan mengawasi jalannya program, hingga lembaga pelatihan yang memberikan pembekalan keterampilan usaha.

Winarno, Budi. (2017) Implementasi adalah proses yang kompleks yang melibatkan banyak pelaku dan tingkat pemerintahan, yang menekankan pentingnya jaringan antar-lembaga dan kapasitas organisasi dalam menjalankan kebijakan.

Widodo (2017) Implementasi adalah tahap yang sangat penting dalam siklus kebijakan karena di sinilah keputusan kebijakan benar-benar diwujudkan dalam bentuk pelayanan atau program nyata kepada masyarakat.

Menurut Grindle (dalam Wahab) (2017) Implementasi adalah proses yang menentukan apakah suatu kebijakan bisa berhasil atau tidak. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya.

Sedangkan menurut Herman dalam Farida (2008) mengemukakan definisi program sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.

Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2016) juga mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Menurut kasmir (2020) modal usaha adalah elemen dasar untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis. Program Bantuan Modal Usaha dirancang untuk memberikan solusi terhadap masalah keterbatasan modal yang sering dihadapi pelaku usaha kecil dan mikro. Selain itu, bantuan modal harus disertai dengan pelatihan pengelolaan keuangan untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan produktif.

Secara garis besar, modal usaha mandiri merujuk pada sumber daya atau aset yang digunakan untuk memulai dan menjalankan usaha yang berasal dari pemilik usaha itu sendiri, tanpa melibatkan pinjaman atau investasi dari pihak luar pada tahap awal.

Mardiyatmo (2008) Beliau secara eksplisit menyatakan bahwa modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Sumbernya dapat berupa tabungan pribadi, sumbangan atau hibah dari keluarga, atau aset pribadi lain yang diinvestasikan ke dalam usaha. Dalam konteks modal usaha mandiri, pandangan ini sangat relevan karena menekankan kemandirian sumber pendanaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti masalah "Implementasi Program Bantuan Modal Usaha Tenaga Kerja Mandiri Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di Kabupaten Polewali"

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam Implementasi Program Bantuan Modal Usaha Tenaga Kerja Mandiri Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di Kabupaten Polewali. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2017), penelitian lapangan dilakukan secara langsung di lokasi untuk menangkap fenomena secara alami. Data diperoleh

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna mendapatkan informasi primer yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, dari Mei hingga Juni 2025, bertempat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Fokus utama penelitian adalah pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha Tenaga Kerja Mandiri Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di Kabupaten Polewali. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 15 orang, termasuk Masyarakat penerima bantuan modal usaha TKM, Dinas Tenaga kerja. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012) Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, alat tulis, serta alat perekam. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha Tenaga Kerja Mandiri, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta dokumentasi berupa dokumen resmi, peraturan, dan literatur yang relevan.

Data yang dianalisis menggunakan tiga langkah reduksi data untuk menyortir informasi penting, analisis data dalam format sistematis, dan kesimpulan atau verifikasi untuk menilai validitas dan keterkaitan data dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Proses

a.1 Persiapan Informasi Program TKM

Hasil penelitian menggambarkan proses dan kesiapan informasi dalam pelaksanaan Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), yang merupakan bagian dari upaya Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pembentukan dan penguatan usaha kelompok masyarakat.

Penelitian ini juga mengkaji strategi komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi program TKM. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa metode yang paling efektif

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak M.Irdan Natsir, S, STP, M.A.P sebagai kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

“Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja mandiri melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam program ini, para calon tenaga kerja dibekali pelatihan dan dukungan modal usaha agar mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, baik secara individu maupun kelompok.”(20 mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak H. Andi Ibrahim Wela, SP., MP sebagai sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

“Kami pastikan data yang dikumpulkan diverifikasi secara ketat dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Selain itu, informasi tersebut digunakan untuk menyusun rencana kerja dan pelatihan yang realistis, sesuai dengan kebutuhan lapangan. Monitoring dan evaluasi juga kami lakukan secara berkala untuk

menyesuaikan program dengan perkembangan di lapangan”(20 mei 2025)

Persiapan informasi program TKM di beberapa wilayah masih menghadapi kendala dari segi penyebaran, pemahaman, dan kesiapan administratif kelompok sasaran. Perlu pendekatan komunikasi yang lebih adaptif serta penguatan peran pendamping untuk meningkatkan partisipasi dan efektivitas pelaksanaan program.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek informasi merupakan fondasi awal yang sangat penting dalam pelaksanaan Program TKM. Tanpa informasi yang jelas, mudah dipahami, dan merata, maka partisipasi masyarakat akan rendah dan potensi keberhasilan program menjadi terbatas. Dengan perbaikan pada sistem penyampaian informasi dan peningkatan peran pendamping serta pemerintah desa, program TKM memiliki peluang besar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Maka perlunya untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai sasaran. Dengan memanfaatkan potensi lokal, memperkuat kolaborasi antar pihak, dan melakukan penyebaran informasi yang efektif, diharapkan program ini dapat menjadi solusi pengurangan pengangguran serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis kemandirian.

a.2 Pendaftaran

Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) merupakan inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang bertujuan menciptakan lapangan kerja berbasis potensi lokal. Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu wilayah dengan potensi sumber daya manusia dan alam yang besar, menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program ini.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Sigit sebagai Penerima Bantuan TKM

“Saya sangat mendukung program TKM karena bisa membantu orang-orang yang ingin usaha tapi tidak punya modal. Program seperti ini harus diwajibkan atau disosialisasikan lebih luas, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu.”(26 mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Sigit sebagai Penerima Bantuan TKM

“Iya, menurut saya pendaftaran TKM sebaiknya diwajibkan untuk warga usia produktif yang belum punya pekerjaan tetap. Supaya mereka bisa punya penghasilan sendiri dan tidak bergantung pada bantuan terus-menerus. Apalagi sekarang banyak anak muda di desa yang masih nganggur”(26 mei 2025)

Proses pendaftaran Program TKM di Kabupaten Polewali Mandar secara umum telah berjalan dengan baik dan transparan, meskipun masih terdapat kendala dalam penyebaran informasi dan keterbatasan sumber daya. Diperlukan peningkatan koordinasi antara Disnakertrans, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat untuk memperluas akses informasi serta mendorong partisipasi masyarakat secara lebih merata.

Keseluruhan kendala ini menunjukkan pentingnya pendekatan terintegrasi, partisipatif, dan adaptif dalam proses pendaftaran TKM, khususnya di daerah yang memiliki tantangan geografis dan sosial seperti di

kabupaten Polewali Mandar. Perlu adanya sinergi lintas sektor, penyederhanaan prosedur, serta pemberdayaan lokal agar tujuan program benar-benar menysasar kelompok yang tepat dan berkelanjutan.

a.3 Seleksi

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat kita lihat bawah Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program TKM, termasuk syarat, manfaat, serta cara pendaftaran. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, atau langsung ke komunitas masyarakat.

Dari hasil penelitian bisa kita liat alur atau Proses seleksi TKM di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi program kepada masyarakat melalui desa dan kelurahan
- b. Pendaftaran dan pengumpulan proposal usaha
- c. Verifikasi dokumen dan kunjungan lapangan
- d. Wawancara calon peserta

Penetapan peserta yang lolos seleksi berdasarkan kelayakan usaha, motivasi, dan potensi pemberdayaan

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Munawarah, S. Sos sebagai Koordinator Lapangan Program TKM

“Kami di lapangan sangat fokus pada verifikasi calon peserta. Tidak hanya melihat dokumen, tetapi juga memastikan bahwa calon peserta memang memiliki niat dan kesiapan usaha. Banyak yang hanya tertarik karena ingin dapat bantuan, tapi belum punya perencanaan yang matang. Karena itu, kami lebih selektif dalam merekomendasikan peserta ke tahap selanjutnya. Kami juga bantu mereka menyusun ulang proposal jika memang usahanya potensial tapi penulisan awalnya kurang tepat”(20 mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Abdul Malik, A.Md sebagai staf Administrasi Pendaftaran Program TKM

“Setiap tahun kami menerima ratusan berkas pendaftaran untuk program TKM. Sayangnya, banyak yang gugur di tahap administrasi karena dokumen tidak lengkap atau proposalnya copy-paste dari internet. Kami biasanya memberi waktu tambahan untuk melengkapi, tapi hanya untuk yang serius. Ke depannya kami berharap ada sistem digital agar proses pendaftaran lebih efisien dan tidak menyita banyak waktu untuk sortir manual’ (20 mei 2025)

Seleksi TKM di Kabupaten Polewali Mandar telah dilaksanakan secara prosedural meski menghadapi beberapa kendala teknis dan administratif. Diperlukan peningkatan kapasitas pendamping dan penyederhanaan mekanisme seleksi agar dapat menjangkau lebih banyak calon peserta potensial di daerah tertinggal.

Kendala dalam proses seleksi TKM di Kabupaten Polewali Mandar sangat beragam dan multidimensional, mencakup aspek teknis, sosial, budaya, dan struktural. Penanganan kendala ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku

kepentingan, serta pemanfaatan teknologi untuk memastikan proses seleksi yang adil, transparan, dan tepat sasaran.

a.4 Pencairan Dana

Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) merupakan inisiatif dari Kementerian Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui bantuan modal usaha. Di Kabupaten Polewali Mandar, program ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menciptakan 10.000 lapangan kerja baru, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019–2024.

Berdasarkan Petunjuk Teknis TKM Pemula Tahun 2024, proses pencairan dana TKM dilakukan melalui beberapa tahapan:

- a. Pembukaan Rekening: Bank penyalur membuka rekening atas nama penerima bantuan.
- b. Persyaratan Pencairan: Penerima bantuan harus menyerahkan dokumen seperti salinan Surat Keputusan penetapan penerima bantuan, salinan perjanjian kerja sama antara PPK Bantuan dan penerima bantuan, serta KTP.
- c. Pencairan Dana: Setelah verifikasi dokumen, bank menyalurkan dana ke rekening penerima.
- d. Pelaporan: Bank penyalur melaporkan perkembangan pencairan dana kepada PPK Bantuan secara periodik hingga seluruh dana tersalurkan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Darianto Rahman sebagai penerima modal TKM

“Kami mengajukan proposal pada bulan Juli 2024. Setelah menunggu sekitar dua bulan dan menjalani proses verifikasi lapangan, dana dicairkan pada bulan September 2024. Dana langsung masuk ke rekening kelompok atas nama TKM Muda Mandiri”(27 mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Sigit sebagai penerima modal TKM

“Awalnya ada kendala administrasi karena kami belum memiliki rekening kelompok. Kami dibantu oleh beberapa anak muda yang mengerti untuk mengurusnya di bank. Selain itu, verifikasi proposal cukup ketat, kami diminta melengkapi detail rencana usaha dan komposisi anggota. Tapi setelah lengkap, prosesnya berjalan lancar”(27 mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Ma’ruf sebagai penerima modal TKM

“menurut saya perlu ada pendamping untuk betul-betul memberikan kami petunjuk tentang bagaman caranya untuk melakukan pencairan dana, seperti kemarin banya ternyata berkas yang di butuh kan jadi kembali lagi mengambil, pas kembali ke bank tutup mi lagi, terpaksa besoknya pi lagi.”(27 mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Pardi sebagai penerima modal TKM

“Kami harap program ini tetap berlanjut dan makin banyak pemuda yang dibina. Tapi juga penting ada pelatihan lanjutan, seperti manajemen usaha dan pemasaran online, supaya usaha kami bisa berkembang lebih luas. Kami juga berharap ada pendampingan terus,

terutama dalam pengelolaan laporan keuangan”(28 mei 2025)

Hari hasil wawancara di beberapa responden bisa kita simpulkan bahwa Di Kabupaten Polewali Mandar, implementasi program TKM didukung oleh berbagai pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dan ESDM. Pada tahun 2024, sebanyak 354 peserta mengikuti pelatihan di bidang menjahit, pertukangan kayu, perbengkelan las, dan otomotif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja dan mendukung target penciptaan 10.000 tenaga kerja baru.

Dari hasil penelitian dapat kita lihat bahwa Program TKM di Polewali Mandar secara umum berjalan baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kewirausahaan dan pengurangan pengangguran. Namun, keberhasilan sangat bergantung pada kualitas pendampingan, kesiapan administrasi, dan komitmen kelompok penerima.

Kendala pencairan dana TKM di Kabupaten Polewali Mandar tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, geografis, dan struktural. Oleh karena itu, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kearifan lokal, kebutuhan peserta, dan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat.

a.5 Pelaksanaan Usaha

Pelaksanaan program dimulai dengan pembentukan kelompok yang terdiri dari 5-10 anggota. Kelompok mengajukan proposal usaha kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Polewali Mandar. Setelah melewati tahap seleksi administrasi dan verifikasi lapangan, kelompok yang lolos mendapatkan dana stimulan.

Proses pencairan dana dilakukan melalui transfer ke rekening kelompok. Waktu pencairan biasanya memakan waktu 1-3 bulan setelah proposal disetujui. Pendamping lapangan berperan penting dalam membantu kelompok menyusun proposal dan mempersiapkan administrasi agar dana dapat dicairkan tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak M.Irdan Natsir, S, STP, M.A.P sebagai kepala dinas tenaga kerja “Program TKM merupakan salah satu prioritas kami dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi pengangguran. Pelaksanaan program berjalan dengan baik, dimulai dari pembentukan kelompok usaha, seleksi proposal, hingga pencairan dana. Kami berusaha memberikan pendampingan agar dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, kendala seperti kurangnya pengalaman pengelolaan usaha dan pemasaran masih sering kami temui di lapangan. Kami berkomitmen meningkatkan pelatihan dan pengawasan agar hasilnya lebih maksimal”(20 mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Darianto Rahman sebagai penerima modal TKM

“Saya dan anggota kelompok merasa sangat terbantu dengan dana yang kami terima. Kami menggunakan dana untuk membeli mesin pengolah makanan ringan dan bahan baku. Awalnya kami mengalami kesulitan mengatur modal dan memasarkan produk, tetapi dengan

bimbingan dari pendamping, usaha kami mulai berjalan lancar. Kini kami sudah bisa menjual produk ke pasar tradisional dan beberapa toko di sekitar. Kami berharap bantuan seperti ini terus berlanjut agar usaha kami bisa berkembang”(29 mei 2025)

Pelaksanaan usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Kabupaten Polewali Mandar secara umum berjalan sesuai rencana dengan hasil yang beragam. Kelompok yang memiliki pengelolaan baik dan mendapat pendampingan intensif mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi nyata.

Namun, kendala dalam pengelolaan usaha, keterbatasan modal lanjutan, serta akses pasar masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi agar program lebih optimal.

Pembahasan mengenai Pelaksanaan usaha TKM di Kabupaten Polewali Mandar dibebani kendala multifaset: ekonomi (harga, pasok, persaingan), infrastruktur (akses internet, distribusi), sosial-kultural, hingga lingkungan (cuaca). Untuk menjamin keberlanjutan usaha, perlu strategi holistik mulai dari stabilisasi harga bahan baku, penguatan rantai pasok lokal, pendampingan e-commerce yang lebih hands-on, hingga mitigasi risiko cuaca melalui gudang terpadu dan asuransi pertanian/nelayan.

B. Pendamping TKM

b.1 Fasilitas

Fasilitas pendamping TKM adalah bantuan dan dukungan yang diberikan kepada para pendamping Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk membantu pelaku usaha binaan dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha mereka. Pendamping berperan sebagai fasilitator, mentor, sekaligus penghubung antara TKM dan pihak-pihak terkait, termasuk instansi pemerintah.

Dari hasil penelitian oleh bapak fauzan “Yang paling dibutuhkan adalah kendaraan operasional atau bantuan transportasi yang layak, alat bantu presentasi seperti laptop dan proyektor untuk edukasi kelompok, serta koneksi internet untuk pelaporan dan komunikasi daring.”(20 Mei 2025)

Fasilitas pendamping TKM merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Tanpa fasilitas yang memadai, pendamping akan mengalami banyak kendala dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Oleh karena itu, penyediaan dan pengelolaan fasilitas perlu menjadi perhatian serius dari pihak penyelenggara program maupun instansi pemerintah terkait.

b.2 Edukasi

Edukasi pendamping TKM adalah proses pembelajaran dan pelatihan yang diberikan kepada para pendamping TKM agar mereka memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai dalam membina dan mendampingi TKM. Tujuannya agar proses pendampingan menjadi lebih efektif dan berdaya guna.

Dari hasil wawancara oleh bapak fauzan

“Edukasi itu sangat penting bagi kami sebagai pendamping. Karena tanpa pemahaman yang cukup, kita tidak bisa memberi arahan yang tepat ke TKM. Edukasi juga membuat kami percaya diri saat membina dan menyampaikan informasi ke masyarakat.”(23 Mei 2025)

Edukasi pendamping TKM adalah bagian penting dari keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat, pendamping dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dukungan dari pemerintah dan lembaga pelaksana sangat dibutuhkan untuk memastikan edukasi ini berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata. 5.

b.3 Motivasi

Motivasi pendamping TKM adalah dorongan internal maupun eksternal yang mendorong seorang pendamping untuk bekerja secara sungguh-sungguh dalam mendampingi, membina, dan memberdayakan Tenaga Kerja Mandiri agar mencapai kemandirian ekonomi dan sosial.

Dari hasil wawancara oleh bapak fauzan.

“Saya merasa terpanggil untuk membantu masyarakat agar bisa mandiri secara ekonomi. Banyak masyarakat, terutama kepala keluarga dan pemuda, yang sebenarnya punya potensi tapi belum tahu cara memulainya. Saya ingin menjadi jembatan mereka untuk bisa berkembang.”(23 Mei 2025)

Motivasi pendamping TKM adalah fondasi penting dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pendamping yang termotivasi akan lebih aktif, kreatif, dan berdedikasi dalam membantu TKM mencapai kemandirian. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk instansi terkait, untuk terus menjaga dan meningkatkan motivasi pendamping melalui dukungan nyata dan berkelanjutan.

b.4 Advokasi

pendamping TKM adalah elemen penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Dengan advokasi yang efektif, TKM dapat lebih mudah mengakses sumber daya dan program yang mereka butuhkan, sehingga keberlanjutan usaha mereka dapat terjamin. Pendamping berperan sebagai penghubung dan pelindung hak TKM agar mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan dukungan yang maksimal.

Dari hasil wawancara oleh bapak fauzan

“Bagi saya, advokasi adalah usaha kita sebagai pendamping untuk memperjuangkan kebutuhan TKM, terutama ketika mereka menghadapi hambatan, baik dari sisi perizinan, akses modal, atau ketidakjelasan kebijakan pemerintah. Kita menjadi jembatan antara TKM dan pihak-pihak terkait.”(23 Mei 2025)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi

A. Tahapan proses program TKM

1. Persiapan Informasi Program TKM

Program telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media, namun belum sepenuhnya menjangkau daerah terpencil.

2. Pendaftaran

Proses pendaftaran berjalan cukup baik dan terbuka, meskipun masih ada hambatan teknis, terutama bagi peserta yang kurang familiar dengan teknologi digital..

3. Seleksi

Seleksi dilakukan berdasarkan kriteria yang ditentukan dan telah menjangkau peserta dengan potensi usaha yang layak.

4. Pencairan Dana

Proses pencairan dana pada umumnya berjalan lancar, namun masih terdapat kendala administratif dan teknis yang perlu segera diatasi.

5. Pelaksanaan Usaha

Sebagian besar peserta telah melaksanakan usaha sesuai rencana dan menunjukkan perkembangan positif.

B. Pendamping program TKM

1. Fasilitas

Edukasi pendamping TKM adalah proses pembelajaran dan pelatihan yang diberikan kepada para pendamping TKM agar mereka memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai dalam membina dan mendampingi TKM Fasilitas pendamping TKM adalah bantuan dan dukungan yang diberikan kepada para pendamping Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk membantu pelaku usaha binaan dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha mereka

2. Motivasi

Motivasi pendamping TKM adalah dorongan internal maupun eksternal yang mendorong seorang pendamping untuk bekerja secara sungguh-sungguh dalam mendampingi, membina, dan memberdayakan Tenaga Kerja Mandiri agar mencapai kemandirian ekonomi dan social

3. Advokasi

Dengan advokasi yang efektif, TKM dapat lebih mudah mengakses sumber daya dan program yang mereka butuhkan, sehingga keberlanjutan usaha mereka dapat terjamin

4. Edukasi

Edukasi pendamping TKM adalah proses pembelajaran dan pelatihan yang diberikan kepada para pendamping TKM agar mereka memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai dalam membina dan mendampingi TKM

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, M. (2016). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Farida Yusuf. (2008). Evaluasi program dan instrumen evaluasi untuk program pendidikan dan penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.

(Note: Nama “Herman dalam Farida Yusuf” tidak dapat dimasukkan dalam APA karena tidak sesuai struktur penulis; yang digunakan adalah penulis buku utamanya.)

Mardiyatmo. (2008). Kewirausahaan. Jakarta: Yudhistira.

Kasmir. (2020). Kewirausahaan: Teori, praktik, dan kasus-kasus. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Widodo, J. (2017). Analisis kebijakan publik. Malang: Bayumedia Publishing.

Wahab, S. A. (2017). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. (2017). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.